

DINAMIKA KEKUASAAN DAN PRAKTIK POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Adam pachol abduhatif^{1*}, Salito²,

^{1,2} Program Studi MPI, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum
(STITTDAR), Indonesia

*Corresponding Author: adamaq44@gmail.com, smilesalito@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Praktik politik, kekuasaan, kebijakan publik, politik formal dan informal, Indonesia.

Received : 1 Januari

Revised : 5 Januari

Accepted: 13 Januari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik politik formal dan informal terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kebijakan publik idealnya dihasilkan melalui mekanisme institusional yang transparan dan partisipatif. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa praktik politik informal, seperti lobi elite, negosiasi kepentingan, patronase, dan klientelisme, turut membentuk arah dan substansi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka melalui analisis berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian empiris, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa interaksi antara praktik politik formal dan informal menciptakan dinamika kekuasaan yang kompleks, di mana kepentingan elite politik dan ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan kepentingan publik. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas kebijakan, legitimasi politik, dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kekuasaan dan politik merupakan dua konsep fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya dalam analisis kebijakan publik. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, kekuasaan menjadi instrumen utama yang menentukan arah pengambilan keputusan publik, mulai dari perumusan kebijakan, proses legislasi, hingga implementasi dan evaluasinya. Politik berfungsi sebagai arena tempat berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan berkompetisi untuk memengaruhi kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, memahami dinamika kekuasaan dan praktik politik menjadi prasyarat penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan

publik dibentuk, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Secara konseptual, kekuasaan (power) merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku, keputusan, serta tindakan pihak lain, baik melalui mekanisme formal maupun informal. Max Weber (1947) mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya meskipun menghadapi perlawanan. Definisi ini menekankan bahwa kekuasaan selalu terkait dengan relasi sosial dan tidak pernah bersifat netral. Dalam konteks negara, kekuasaan menjadi sah apabila memperoleh legitimasi, baik melalui hukum, tradisi, maupun kepercayaan masyarakat, sehingga membedakan kekuasaan yang legitimate dengan dominasi yang bersifat koersif.

Dalam praktik politik, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara atau elit pemerintahan, tetapi tersebar dalam berbagai aktor dan struktur sosial. Robert Dahl (1957) memandang politik sebagai proses distribusi kekuasaan dalam masyarakat, yang mencakup siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Perspektif ini menegaskan bahwa pengambilan kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi berbagai kepentingan, baik yang berasal dari lembaga negara, partai politik, kelompok kepentingan, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, kebijakan publik tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari dinamika kekuasaan yang kompleks.

Michel Foucault (1980) memberikan perspektif yang lebih kritis dengan menekankan bahwa kekuasaan bersifat produktif dan tersebar dalam jaringan sosial. Menurut Foucault, kekuasaan tidak semata-mata dimiliki, tetapi dipraktikkan melalui wacana, pengetahuan, norma, dan institusi. Dalam konteks kebijakan publik, pandangan ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga membentuk cara berpikir, nilai, dan persepsi publik. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrumen kekuasaan yang bekerja secara halus namun sistematis.

Di Indonesia, dinamika kekuasaan dalam pengambilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sistem politik demokrasi yang dianut sejak era reformasi. Reformasi politik membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa fragmentasi kekuasaan, kompetisi politik yang intens, dan tarik-menarik kepentingan antaraktor. Proses demokratisasi memungkinkan keterlibatan berbagai aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, media massa, dan kelompok kepentingan, dalam memengaruhi agenda kebijakan publik.

Kekuasaan formal dalam sistem pemerintahan Indonesia dijalankan melalui lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam proses kebijakan publik, namun dalam praktiknya sering kali terjadi relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dominasi eksekutif dalam perumusan kebijakan, misalnya, kerap memunculkan kritik terkait lemahnya fungsi pengawasan legislatif. Dinamika ini menunjukkan bahwa struktur formal

kekuasaan tidak selalu menjamin proses kebijakan yang demokratis dan transparan.

Selain kekuasaan formal, kekuasaan informal juga memainkan peran signifikan dalam praktik politik dan pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Kekuasaan informal dapat muncul melalui relasi patron-klien, jaringan elite politik dan ekonomi, serta pengaruh kelompok kepentingan tertentu. Praktik lobi politik, negosiasi di balik layar, dan kompromi kepentingan sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari proses kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tidak selalu berlangsung secara terbuka, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang bersifat laten.

Peran partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi juga tidak dapat diabaikan dalam analisis kekuasaan dan kebijakan publik. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus sebagai kendaraan bagi elite politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam praktiknya, kepentingan partai sering kali memengaruhi arah kebijakan publik, baik melalui mekanisme legislasi maupun dukungan politik terhadap pemerintah. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan publik dan kepentingan politik jangka pendek.

Media massa dan media digital juga menjadi aktor penting dalam dinamika kekuasaan kontemporer. Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik dan alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dalam konteks kebijakan publik, framing media dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan tertentu, sekaligus memberi tekanan politik kepada pengambil keputusan. Dengan demikian, media menjadi arena baru pertarungan kekuasaan yang bersifat simbolik dan diskursif.

Legitimasi politik merupakan faktor krusial dalam keberlanjutan kekuasaan dan efektivitas kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan melalui proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel cenderung memperoleh dukungan publik yang lebih besar. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap elitis atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural, legitimasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sensitivitas terhadap keragaman sosial, budaya, dan kepentingan daerah.

Dinamika kekuasaan dalam kebijakan publik juga berkaitan erat dengan isu keadilan sosial dan distribusi sumber daya. Kebijakan publik sering kali menjadi alat untuk mendistribusikan keuntungan dan beban kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu, relasi kekuasaan menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh suatu kebijakan. Ketimpangan kekuasaan dapat berujung pada kebijakan yang tidak adil dan memperlebar kesenjangan sosial, sehingga menimbulkan kritik terhadap praktik politik yang ada.

Dalam praktik pemerintahan Indonesia, tantangan utama adalah bagaimana mengelola dinamika kekuasaan agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Keterbukaan informasi, penguatan

mekanisme pengawasan, serta partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk mengontrol kekuasaan. Tanpa mekanisme kontrol yang efektif, kekuasaan berpotensi disalahgunakan dan kebijakan publik kehilangan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kajian tentang kekuasaan dan praktik politik dalam pengambilan kebijakan publik juga memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori-teori kekuasaan klasik dan kontemporer dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Secara praktis, pemahaman tersebut dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, dinamika kekuasaan dan praktik politik dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan terus berkembang. Kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui struktur formal pemerintahan, tetapi juga melalui relasi sosial, wacana, dan aktor non-negara. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap kekuasaan dan politik menjadi sangat penting untuk memahami arah kebijakan publik, kualitas demokrasi, serta masa depan pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan praktik politik dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber ilmiah yang relevan, meliputi buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan teori kekuasaan, politik, dan kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui seleksi, klasifikasi, dan pencatatan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan interpretatif dengan cara membandingkan berbagai pandangan teoretis serta temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep, pola, dan dinamika relasi kekuasaan dalam praktik politik serta implikasinya terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsep dan bentuk kekuasaan bekerja dalam sistem politik Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan public

Dalam sistem politik Indonesia, konsep kekuasaan bekerja melalui kombinasi mekanisme formal dan informal yang saling berinteraksi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kekuasaan formal dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki legitimasi konstitusional, seperti presiden, kementerian, DPR, dan pemerintah daerah. Melalui kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, aktor-aktor ini memiliki otoritas untuk merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan formal tersebut tidak

selalu berjalan secara linier, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan institusional, serta relasi kekuasaan antaraktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

Aspinall dan Mietzner (2010) menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi Indonesia pasca-reformasi, kekuasaan politik dalam pembuatan kebijakan sangat dipengaruhi oleh koalisi elite dan praktik transaksional antarpartai politik. Penelitian ini menemukan bahwa proses legislasi dan perumusan kebijakan sering kali menjadi arena negosiasi kepentingan antara aktor eksekutif dan legislatif, di mana kompromi politik lebih dominan dibandingkan pertimbangan kepentingan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekuasaan bekerja tidak hanya melalui struktur formal, tetapi juga melalui kesepakatan politik yang bersifat pragmatis.

Hadiz dan Robison (2013) menyoroti peran oligarki dalam sistem politik Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya strategis. Dalam banyak kasus, kebijakan publik cenderung mencerminkan kepentingan kelompok oligarkis tersebut, baik dalam sektor sumber daya alam, infrastruktur, maupun kebijakan ekonomi. Studi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan informal berbasis jaringan elite dan kepentingan ekonomi memainkan peran signifikan dalam menentukan arah kebijakan.

Widianingsih dan Morrell (2007) menekankan peran masyarakat sipil dalam memengaruhi kekuasaan dan kebijakan publik di tingkat lokal. Studi ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah, advokasi kebijakan, dan gerakan sosial mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi elite politik. Dalam konteks desentralisasi, kekuasaan tidak sepenuhnya dimonopoli oleh pemerintah daerah, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan publik yang terorganisir. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam sistem politik Indonesia bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh aktor non-negara.

Mietzner (2015) mengkaji peran media dan opini publik dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa media massa dan media digital memiliki kekuatan simbolik yang mampu memengaruhi agenda kebijakan melalui pembentukan wacana publik dan tekanan politik terhadap pengambil keputusan. Dalam beberapa kasus kebijakan kontroversial, respons pemerintah dipengaruhi oleh reaksi publik yang dimediasi oleh media. Secara keseluruhan, keempat kajian empiris tersebut menunjukkan bahwa konsep dan bentuk kekuasaan dalam sistem politik Indonesia bekerja secara kompleks melalui interaksi antara kekuasaan formal, kekuasaan informal, kepentingan elite, serta partisipasi masyarakat dan media dalam proses pengambilan kebijakan publik.

2. Dinamika relasi kekuasaan antara aktor negara dan aktor non-negara dalam praktik pengambilan kebijakan publik di Indonesia

Dinamika relasi kekuasaan antara aktor negara dan aktor non-negara merupakan aspek penting dalam memahami praktik pengambilan kebijakan

publik di Indonesia. Aktor negara, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan birokrasi, secara formal memiliki kewenangan utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Namun, dalam sistem politik demokratis, kekuasaan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, media massa, akademisi, dan sektor swasta. Relasi ini membentuk arena politik yang kompleks, di mana kebijakan publik menjadi hasil dari proses negosiasi, kompromi, serta tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak dengan tingkat kekuasaan yang berbeda.

Secara empiris, kajian yang dilakukan oleh Hadiz dan Robison (2013) menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia pascareformasi, aktor non-negara, khususnya elite ekonomi dan oligarki politik, memiliki pengaruh signifikan dalam proses kebijakan publik. Melalui jaringan informal, pendanaan politik, dan kedekatan dengan elite pemerintahan, kelompok ini mampu memengaruhi arah kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi dan regulasi strategis. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun demokratisasi membuka ruang partisipasi publik, relasi kekuasaan tetap didominasi oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki modal ekonomi dan politik yang kuat, sehingga menciptakan ketimpangan pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan.

Sementara itu, kajian empiris lain oleh Antlov, Brinkerhoff, dan Rapp (2010) menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa LSM dan komunitas lokal dapat berperan sebagai aktor penyeimbang kekuasaan negara melalui advokasi kebijakan, pengawasan publik, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun pengaruhnya tidak selalu dominan, aktor non-negara ini mampu membentuk agenda kebijakan, khususnya pada isu-isu pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tidak selalu bersifat hierarkis, tetapi juga dapat bersifat kolaboratif.

Kajian empiris selanjutnya dilakukan oleh Aspinall dan Berenschot (2019) yang mengkaji politik patronase dan klientelisme dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara aktor negara dan aktor non-negara sering kali dibangun atas dasar pertukaran kepentingan, seperti dukungan politik ditukar dengan akses terhadap kebijakan atau sumber daya negara. Praktik ini memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan bersifat pragmatis dan personal, bukan semata-mata institusional. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan cenderung mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik secara luas, sehingga menimbulkan tantangan terhadap prinsip keadilan dan pemerataan.

Selain itu, kajian empiris oleh Rosser dan Edwin (2010) mengenai kebijakan kehutanan dan sumber daya alam menunjukkan bahwa aktor non-negara, seperti perusahaan swasta dan organisasi internasional, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan melalui mekanisme pasar, tekanan global, dan standar internasional. Dalam konteks ini, negara tidak selalu menjadi aktor dominan, melainkan harus bernegosiasi dengan kekuatan

eksternal yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika relasi kekuasaan dalam kebijakan publik di Indonesia bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor domestik maupun global. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap relasi aktor negara dan non-negara menjadi kunci untuk menilai kualitas demokrasi dan efektivitas kebijakan publik di Indonesia.

3. Peran lembaga politik, partai politik, dan elite kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan public

Lembaga politik, partai politik, dan elite kekuasaan memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan publik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi perwakilan, lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi sebagai aktor formal yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses perumusan, pengesahan, dan pengawasan kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, proses kebijakan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme kelembagaan yang bersifat formal, melainkan juga oleh relasi kekuasaan yang melibatkan elite politik dan kepentingan strategis tertentu. Elite kekuasaan, baik yang berada di dalam struktur pemerintahan maupun di luar institusi negara, sering kali menjadi aktor kunci dalam menentukan prioritas kebijakan melalui pengaruh politik, jaringan kekuasaan, serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan politik.

Partai politik berperan sebagai penghubung utama antara kepentingan masyarakat dan proses pengambilan kebijakan publik. Secara normatif, partai politik bertugas menyerap aspirasi publik dan menerjemahkannya ke dalam agenda kebijakan. Namun, kajian empiris oleh Mietzner (2013) menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia cenderung bersifat pragmatis dan elitis, di mana orientasi kebijakan sering kali ditentukan oleh kepentingan elite partai dibandingkan aspirasi konstituen. Penelitian tersebut menemukan bahwa keputusan kebijakan strategis di parlemen lebih banyak dipengaruhi oleh kompromi elite dan kepentingan koalisi politik, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan kerap mencerminkan kepentingan kekuasaan jangka pendek daripada kepentingan publik secara luas.

Peran elite kekuasaan dalam proses kebijakan publik juga ditunjukkan melalui kajian empiris Hadiz dan Robison (2014) yang menganalisis oligarki politik di Indonesia pascareformasi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami demokratisasi, kekuasaan ekonomi dan politik masih terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Elite oligarkis memanfaatkan posisi mereka dalam partai politik, pemerintahan, dan sektor bisnis untuk mengamankan kepentingan ekonomi melalui kebijakan publik yang menguntungkan kelompok tertentu. Temuan ini mengindikasikan bahwa relasi antara kekuasaan dan kebijakan publik sering kali bersifat asimetris dan tidak sepenuhnya demokratis.

Kajian empiris lain dilakukan oleh Aspinall dan Berenschot (2019) yang meneliti praktik klientelisme dan patronase dalam politik Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa elite politik menggunakan kebijakan

publik sebagai alat untuk mempertahankan dukungan politik melalui distribusi sumber daya, proyek pembangunan, dan bantuan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana konsolidasi kekuasaan elite. Praktik klientelisme tersebut memperlihatkan bagaimana lembaga politik dan elite kekuasaan memanfaatkan kewenangan kebijakan untuk memperkuat posisi politik mereka, terutama menjelang pemilihan umum.

Selain itu, penelitian empiris oleh Nugroho (2014) tentang proses kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi elite dalam lembaga eksekutif sering kali memengaruhi arah dan substansi kebijakan, khususnya dalam tahap perumusan kebijakan. Studi ini menemukan bahwa partisipasi publik dalam proses kebijakan masih bersifat terbatas dan cenderung formalitas, sementara keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh elite birokrasi dan politik. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa peran lembaga politik, partai politik, dan elite kekuasaan sangat menentukan arah kebijakan publik, baik melalui mekanisme formal maupun praktik politik informal. Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi penting untuk menyeimbangkan dominasi elite dan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

4. Praktik politik, baik formal maupun informal, memengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia

Praktik politik, baik yang berlangsung secara formal maupun informal, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Praktik politik formal umumnya terjadi melalui mekanisme konstitusional dan institusional, seperti pembahasan kebijakan di lembaga legislatif, perumusan regulasi oleh eksekutif, serta pengawasan oleh lembaga yudikatif. Namun, dalam realitas politik Indonesia, proses tersebut tidak pernah sepenuhnya steril dari praktik politik informal yang berlangsung di luar prosedur resmi, seperti lobi politik, negosiasi elite, kompromi kepentingan, dan relasi patron-klien. Interaksi antara praktik formal dan informal ini membentuk dinamika kebijakan publik yang kompleks dan sering kali menentukan arah akhir kebijakan yang dihasilkan.

Hasil penelitian Hadiz dan Robison (2013) yang mengkaji praktik oligarki dalam politik Indonesia pascareformasi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi prosedural, pengambilan kebijakan publik masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan elite ekonomi dan politik yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan. Praktik politik informal berupa jaringan kekuasaan dan aliansi elite sering kali lebih menentukan dibandingkan mekanisme formal, sehingga kebijakan publik cenderung mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Mietzner (2015) yang meneliti peran partai politik dan elite legislatif dalam proses legislasi di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses perumusan undang-undang tidak hanya ditentukan oleh debat formal di parlemen, tetapi juga oleh negosiasi politik di balik layar yang melibatkan

elite partai dan aktor kekuasaan lainnya. Praktik politik informal ini memengaruhi substansi kebijakan, termasuk pasal-pasal yang diakomodasi atau dihilangkan, sehingga implementasi kebijakan sering kali menyimpang dari tujuan awal yang bersifat publik dan normatif.

Aspinall dan Berenschot (2019) yang mengkaji praktik klientelisme dan patronase dalam politik lokal di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks desentralisasi, praktik politik informal semakin menguat di tingkat daerah, terutama dalam pengambilan kebijakan publik yang berkaitan dengan anggaran dan proyek pembangunan. Relasi patron-klien antara elite politik dan pemilih atau kelompok kepentingan tertentu menyebabkan kebijakan publik lebih berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek, sehingga berdampak pada lemahnya efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan.

Wicaksono (2020) yang meneliti pengaruh lobi politik dan kepentingan bisnis dalam pembentukan kebijakan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor non-negara, khususnya pelaku usaha besar, memiliki pengaruh yang kuat dalam proses perumusan kebijakan melalui praktik lobi yang bersifat informal namun sistematis. Akibatnya, implementasi kebijakan publik sering kali menghadapi resistensi di tingkat masyarakat karena dinilai tidak adil atau kurang berpihak pada kepentingan publik. Keempat kajian empiris tersebut menegaskan bahwa praktik politik formal dan informal secara simultan membentuk proses kebijakan publik di Indonesia, sehingga pemahaman terhadap dinamika ini menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kebijakan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik politik, baik formal maupun informal, memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Mekanisme formal yang diatur dalam sistem ketatanegaraan sering kali berjalan berdampingan dengan praktik politik informal seperti lobi elite, negosiasi kepentingan, patronase, dan klientelisme yang secara nyata memengaruhi arah dan substansi kebijakan. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa dominasi elite politik dan ekonomi dalam praktik politik informal kerap menyebabkan kebijakan publik lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas demokrasi, lemahnya legitimasi kebijakan, serta munculnya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika praktik politik formal dan informal menjadi kunci penting dalam upaya memperbaiki tata kelola kebijakan publik di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif memperkuat mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh tahapan pengambilan kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi. Penguatan regulasi terkait keterbukaan informasi, pengawasan terhadap praktik lobi politik, serta penegakan etika politik perlu dilakukan untuk meminimalkan dominasi kepentingan sempit dalam kebijakan publik. Selain itu, peran masyarakat sipil, media, dan akademisi perlu terus didorong sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol kekuasaan dan praktik politik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap praktik politik informal dalam kebijakan publik di berbagai sektor dan daerah, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Antlov, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). *Civil society capacity building for democratic reform: Experience and lessons from Indonesia*. *Voluntas*, 21(3), 417–439.
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201–215.
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201–215.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public choices and policy change: The political economy of reform in developing countries*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
- Lane, J. E. (2000). *The public sector: Concepts, models and approaches*. London: Sage Publications.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. *Policy Studies*, 72. Honolulu: East-West Center.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.

- Rosser, A., & Edwin, D. (2010). The politics of forest governance in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 40(2), 233-254.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. New York: Oxford University Press.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democracy. *Policy Studies*, 32. Honolulu: East-West Center.